BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Thoha Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye mengemukakan bahwa "*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Bagi Dye, kebijakan publik itu harus mencangkup bukan saja apa yang benar-benar diinginkan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Karena menurut Dye, baik yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat (Islamy, 2014). Definisi kebijakan dari Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan

publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Agustino, 2008).

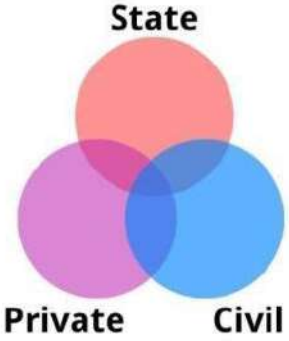
b. Konsep dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Lingkup kebijakan publik mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, dan pertahanan, antara lain. Kebijakan publik publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal berdasarkan hirarkinya, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah nasional, provinsi, kabupaten, dan walikota. Konsep kebijakan publik sangat luas karena mencakup hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah ketika menghadapi masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa jalan raya rusak, mereka tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya (Subarsono, 2011).

c. Aktor dan Pelaku Kebijakan Publik

Pemerintahan politik adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan pemerintahan administrasi adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari pemerintahan meliputi 3 unsur yaitu:

Gambar 1
Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik

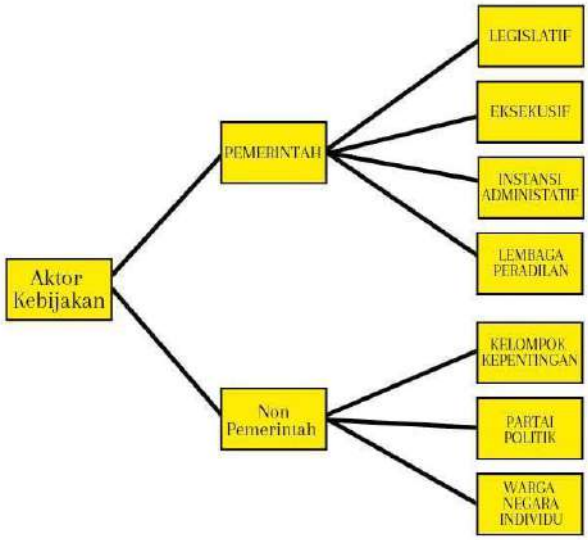


Sumber: Madani, 2011

1) *State* terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif
2) *Private* terdiri dari pengusaha/swasta
3) *Civil society* terdiri dari warga negara individu, partai politik, NGOs

Aktor kebijakan publik terbagi atas 2 yaitu Pemerintah dan Nonpemerintah

Gambar 2
Aktor-Aktor Kebijakan Publik



Sumber: Agustino, 2008

1) Legislatif adalah membuat peraturan dan kebijakan untuk sistem politik.
2) Eksekutif, berarti keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan, yang dapat dilihat dalam rapat kabinet atau komisi presidensial. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara pribadi dalam pembuatan kebijakan.
3) Instansi Administrasi adalah sumber utama dari usulan peraturan-undangan yang dibuat dalam suatu sistem politik. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk merencanakan

peraturan perundang-undangan yang diperlukan atau diinginkan, tetapi mereka juga secara aktif berusaha untuk mendorong pelaksanaannya. Akibatnya, kebijakan bergantung pada seberapa baik administrasinya.

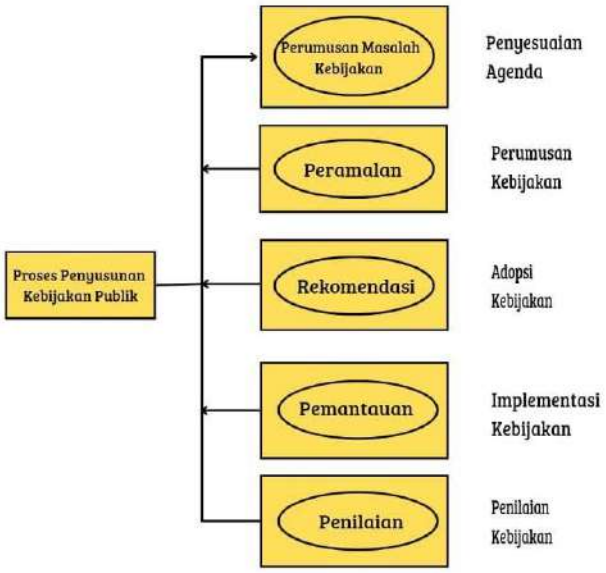
4) Lembaga Peradilan yaitu untuk menjaga hukum dan keadilan serta memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang berlaku.
5) Kelompok Kepentingan yaitu hampir semua sistem politik di seluruh dunia, kelompok-kelompok ini bertugas untuk menggabungkan kepentingan "warga tertentu" dan memberikan dukungan, tuntutan, dan alternatif tindakan kebijakan.
6) Partai Politik yaitu selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, dimana mereka memenangkan pemilihan umum.
7) Warga Negara Individu tugasnya untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga Negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

d. Proses Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik

Proses Penyusunan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut yaitu serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan. Sedangkan aktivitas

perumusan masalah terdiri dari perumusan masalah, *forecasting,* rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Gambar 3
Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17 dalam (Subarsono, 2011)

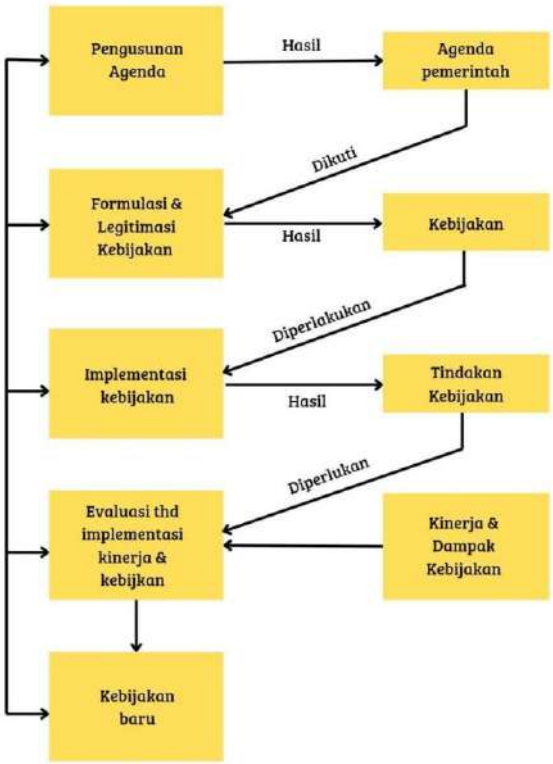
Tabel 3
Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari ditetapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil

Evaluasi Kebijakan	dari suatu kebijakan.

Sumber: (Subarsono, 2011)

Gambar 4
Tahapan Kebijakan



Sumber: Ripley (dalam Subarsono, 2011)

2. Implementasi Kebijakan Publik

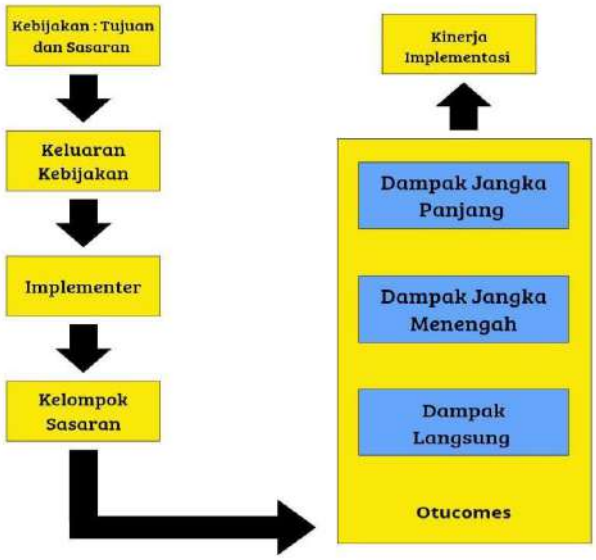
a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai

alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Roring et al., 2021). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya interferensi berbagai kepentingan (Agustino, 2008).

b. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Gambar 5
Proses Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: Purwanti & Sulistyastuti, 2015

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa proses implementasi berasal dari adanya kebijakan atau program, yang dimana suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan.

c. Teori – Teori Implementasi

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III (Pramono, 2020) berpandangan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
   a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
   b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
   c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
   d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure*

(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Pramono, 2020) dipengaruhi oleh 2 variabel besar yaitu: Isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
    1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
    2) Derajat perubahan yang diinginkan.
    3) Kedudukan pembuat kebijakan.
    4) (Siapa) pelaksana program.
    5) Sumber daya yang dihasilkan

b) Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
    1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
    2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
    3) Kepatuhan dan daya tanggap.

c) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Pramono, 2020)

Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan undang-undang (*ability 8 of statut to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*non statutory variables of acting implementation*).

a. Karakteristik masalah, meliputi:
    1) Ketersediaan teknologi dan teori kausal
    2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
    3) Sifat populasi
    4) Derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
b. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, meliputi:
    1) Kejelasan/konsistensi tujuan atau sasaran;
    2) Teori kausal yang memadai;
    3) Sumber keuangan yang mencukupi;
    4) Integrasi organisasi pelaksana;
    5) Diskresi pelaksana;
    6) Rekrutmen dari pejabat pelaksana;
    7) Akses formal pelaksana ke organisasi lain.
c. Faktor-faktor diluar (non) peraturan, meliputi:
    1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
    2) Perhatian terhadap masalah kebijakan;
    3) Dukungan publik;
    4) Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama;
    5) Dukungan kewenangan;

6) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (Pramono, 2020) merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

   Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisir. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

   Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

   Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

   Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain:

kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Mencakup tiga hal penting, yaitu:

1) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor. Teori ini secara eksplisit oleh Van Meter dan Van Horn memasukkan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan.

3. Penanggulangan Pencemaran Sungai

a. Pencemaran Sungai dan Dampaknya

Pencemaran sungai merupakan salah satu permasalahan lingkungan berdampak luas, baik terhadap ekosistem perairan maupun kesehatan manusia.

Pencemaran sungai memiliki dampak negatif, seperti menurunnya kualitas air, terganggunya keseimbangan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya resiko penyakit akibat penggunaan air yang telah tercemar.

b. Kebijakan Penanggulangan Pencemaran Sungai Jeneberang

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan pencemaran sungai. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan standar kualitas lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam PP No. 22 Tahun 2021, pemerintah menetapkan **standar baku mutu lingkungan**, yaitu batas aman zat pencemar yang diperbolehkan masuk ke dalam air, tanah, dan udara. Dengan adanya standar ini, semua kegiatan usaha, industri, maupun rumah tangga yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Jika limbah tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka dianggap mencemari dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam konteks sungai, seperti Sungai Jeneberang, kebijakan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pembuangan limbah ke sungai, baik oleh industri, rumah tangga, maupun pelaku usaha lainnya.

Pada pasal 107 (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan, b, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.

Pada pasal 108 (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebgaimna dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Inventarisasi Badan Air, b. Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air,

c. Perhitungan dan Penetapan alokasi beban pencemar air, d. Penyusunan dan Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Policy Brief

Berdasarkan (LAN, 2017) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan dijelaskan bahwa *Policy brief* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

Pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan juga dijelaskan bahwa dalam pembuatan *policy brie*f perlu diperhatikan beberapa catatan :

a. Fokus pada satu masalah kebijakan;
b. Jelaskan tujuan;
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
d. Argumentasikan dalam narasi yang lebih mudah dipahami;
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (*accessible*) oleh target pembaca atau audiens; dan
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman (maksimal 8 (delapan) halaman).

2. T*ujuan Policy Brief*

Tujuan umum dari *policy brief* adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (*informed evidence-based*) pada organisasi-organisasi yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan). Muatan dalam policy brief menjelaskan isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan dampak. *Policy brief* mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci.

Policy brief dapat memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. *Policy brief* sebagai media eksplorasi tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun *policy brief* juga sebagai media advokasi memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. Analisis penulis akan sangat menentukan saran penulis kepada *decision maker* untuk memilih alternatif kebijakan yang paling ‘tepat’ untuk dipilih (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan).

3. Fungsi *Policy Brief*

Dasar dari fungsi *policy brief* memiliki 2 jenis yaitu:

a. Fungsi Advokasi, memberikan sebuah pilihan tentang sebuah solusi. Dengan adanya fungsi ini, *policy brief* dapat menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan? Apakah keberhasilan yang akan didapat? Dalam kaitannya dengan penyesuaian kebijakan.
b. Fungsi Eksplorasi, memberikan suatu informasi tentang hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan apabila suatu kebijakan

ditentukan. Maka dari itu fungsi ini menjawab apakah jenis dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. *Policy brief* juga dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan analisis terhadap pengembalian investasi dari suatu implementasi kebijakan, dan memberi masukan dalam perancangan suatu kebijakan dan mempengaruhi perubahan.

4. Penyusunan *Policy Brief* yang baik

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan policy brief yang baik Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, yakni;

a. Judul
   1) menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
   2) memunculkan minat pembaca.
   3) singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.

b. Ringkasan eksekutif (*executive summary*)
   1) terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya.
   2) mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
   3) bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
   4) siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.

c. Pendahuluan
   1) terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
   2) mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.

3) Deskripsi Masalah

1) spesifik langsung ke inti permasalahan.

2) terukur disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based*).

3) analisis (apa, dimana, siapa, mengapa, dampak/efek).

4) Rekomendasi

1) spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

2) terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.

3) alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/ pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih).

5) Apendiks (jika diperlukan)

6) Referensi utama

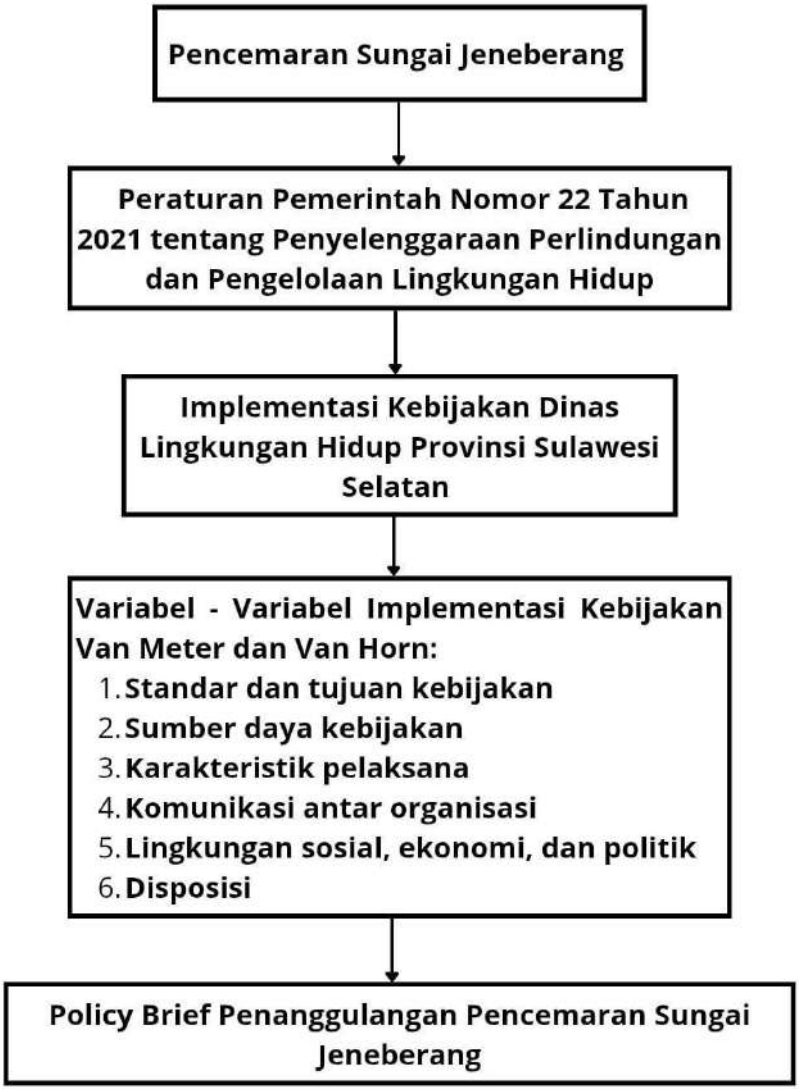
5. Kerangka pikir

Pencemaran sungai masih menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu ditangani dengan upaya yang efektif untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran sungai juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah domestik, dan kegiatan manusia lainnya. Kebijakan penanggulangan pencemaran sungai perlu dirumuskan dengan jelas dan efektif, sehingga tujuan penanggulangan pencemaran dapat tercapai. Kinerja implementasi kebijakan penanggulangan pencemaran perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan penanggulangan pencemaran dapat tercapai.

Dengan menggunakan Van Meter dan Van Horn, dapat menganalisis bagaimana kebijakan penanggulangan pencemaran Sungai Jeneberang dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan yang

diinginkan. Kerangka berpikir ini dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan penanggulangan pencemaran dan mencapai tujuan yang lebih baik dalam menjaga kualitas lingkungan Sungai.

Gambar 6
Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan kerangka pikir tersebut menggambarkan alur logis penelitian mengenai penanggulangan pencemaran sungai Jeneberang. Prosesnya diawali dengan permasalahan utama, yaitu pencemaran yang terjadi di Sungai Jeneberang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam menjaga kualitas lingkungan, termasuk sungai. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai. Implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yang memiliki enam variabel penting:

1) Standar dan tujuan Kebijakan : sejauh mana tujuan kebijakan sudah jelas dan sesuai kebutuhan.
2) Sumber Daya Kebijakan : ketersediaan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana.
3) Karakteristik Pelaksana : kemampuan, struktur organisasi, dan peran pelaksana kebijakan.
4) Komunikasi antar organisasi : koordinasi dan penyampaian informasi antar pihak terkait.
5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik : pengaruh kondisi masyarakat, ekonomi, dan politik terhadap pelaksana kebijakan.
6) Disposisi : sikap, komitmen, dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Hasil dari keenam variabel tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *Policy Brief* atau rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk penanggulangan pencemaran sungai Jeneberang. Kerangka pikir ini membantu menjelaskan hubungan antara masalah, kebijakan, implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi hingga rekomendasi solusi yang dihasilkan.